

**PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA BATU LIMAU
KABUPATEN KARIMUN**

Mohd Rizwan¹, Edy Akhyary², Imam Yudhi Prastya³
160563201010@student.umrah.ac.id

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The purpose of this study was to determine the capacity development of the village government in financial management in Batu Limau Village, Karimun Regency. The development of village government capacity in managing village finances focuses on the dimensions of human resource development, the dimensions of organizational strengthening, the dimensions of systems or institutional reform. These aspects are obtained from identifying and understanding the theory of capacity building by juxtaposing it with empirical conditions in the form of problems and phenomena of village financial management. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach. Data analysis techniques used interactive analysis techniques include three things, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. Determination of informants by purposive sampling, namely people who are considered to know the most about financial management in Batu Limau Village, Ungar Sub-district. The results of this study indicate that 1) This is because all levels of government do not take human resource development seriously, education and training have not been directed to the village information system, have not been carried out with correct and consistent methods, conducive working environment conditions, and utilize potential and opportunities. 2) Organizational development is not going well due to the lack of utilization of personnel, leadership, organizational culture and communication that support the performance of village government organizations in managing village finances. 3) Some activities that need to be optimized are completing implementing/supporting regulations for village laws, changing policies and laws, and strengthening the existing constitution by maximizing village laws.

Keywords: *Capacity Development, Financial Management, Village.*

I. Pendahuluan

Wilayah kabupaten karimun berada diantara kota batam, singapura, malaysia, dan provinsi riau. Hal ini menjadikan karimun sebagai tempat yang sangat strategis terutama untuk kegiatan perekonomian. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.984 Km², dengan luas daratan 1.524 Km² dan luas lautan 6.460 Km². Kabupaten Karimun terdiri dari 198 pulau dengan 67 diantaranya berpenghuni. Kabupaten karimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 174.784 jiwa, dan kabupaten karimun memiliki 12 kecamatan, 29 kelurahan dan 42 desa.

Kecamatan ungar yang berpenduduk 5.983 jiwa yang terdiri dari berbagai suku, dalam kehidupan masyarakatnya berjalan dengan baik, dan penduduk kecamatan ungar agama yang

dipercayai adalah agama islam sebanyak 5.595 orang, kristen 53 orang, budha 335 orang. Disamping itu masyarakat islam yang ada di kecamatan ungar mempunyai rumah ibadah untuk mendekatkan diri kepada allah berjumlah 7 buah masjid dan 4 buah surau, sementara itu rumah ibadah untuk nonmuslim tidak ada satupun. Kecamatan ungar merupakan pemekaran dari kecamatan kundur. Yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 02 tahun 2012, pemerintah mulai efektif pada awal tahun 2013 pada awal terbentuknya kecamatan ungar dipimpin oleh raja jemishak sebagai camat untuk menjalankan pemerintahan, membina administrasi kecamatan ungar. kecamatan ungar terdiri dari 1 kelurahan dan 3 desa, diantaranya kelurahan alai, desa batu limau, desa ngal, desa sungai buluh.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dengan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi desa, pemerintah telah menetapkan beberapa ketentuan terkait dengan sumber keuangan desa. Di dalam Undang-undang desa nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan sumber-sumber pendapatan Desa di antaranya : (a) pendapatan asli desa, (b) alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, (d) alokasi dana desa (add) yang merupakan bagian dari pada dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, (e) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan (g) lain-lain pendapatan desa yang sah. Dari keterangan di atas, salah satu sumber keuangan desa adalah alokasi dana desa. alokasi dana desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus (Permendagri No 113/2014). Menurut Solekhan (2014:88) pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan kekhasan, keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan desa itu sendiri.

Dengan adanya alokasi dana desa (ADD) diharapkan pelaksanaan otonomi desa mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataan dilapangan pemerintah desa dihadapkan kepada permasalahan bagaimana pengelolaan ADD yang efektif, efisien dan responsif. Berikut tabel alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) batu limau tahun 2016-2020 :

Tabel 1.1
Kondisi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
2016-2020

Tahun	ADD (Rp)	DD (Rp)
2016	312.235.900	629.504.100
2017	386.018.400	816.449.700
2018	1.137.406.500	758.899.100
2019	1.368.059.396	885.632.500
2020	1.305.452.500	1.018.871.000

(Sumber : Data olahan peneliti 2021)

Dari tabel alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) diatas dapat dilihat permasalahan alokasi dana desa terjadi di kabupaten karimun provinsi kepulauan riau, dimana alokasi dana desa yang cukup besar telah menimbulkan beberapa persoalan dan belum berdampak berarti kepada kehidupan masyarakat desa batu limau.

Berkaitan dengan permasalahan alokasi dana desa, beberapa permasalahan dan fenomena terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa yang mencakup beberapa hal diantaranya : *Pertama,*

penggunaan alokasi dana desa belum sepenuhnya sejalan dengan kewenangan desa. seperti yang terjadi di desa batu limau kecamatan ungar kabupaten karimun adanya pembangunan yang dibiayai oleh ADD yang bukan merupakan bagan dari lingkup kewenangan pemerintah desa (ketidaksesuaian dengan peruntukan) dan tidak berdasarkan pada kebutuhan prioritas dan kondisi desa. *Kedua*, pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum sepenuhnya digerakkan oleh visi dan misi. Pengelolaan ADD belum mencerminkan program strategis dan prioritas, sehingga arah kegiatan/program-program pembangunan belum maksimal menyentuh kebutuhan dan tuntutan masyarakat. *Ketiga*, kegiatan pengelolaan ADD belum berjalan sesuai dengan tatakelola keuangan yang baik dengan mengedepankan asas partisipatif, transparansi, akuntabel serta tertib dan disiplin. *Keempat*, belum terciptanya jaringan kerja yang sinergi antara pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan masyarakat dalam pengelolaan add untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Permasalahan beserta fenomena berkaitan dengan Pengelolaan ADD yang telah diuraikan diatas, dari pendekatan ilmu pemerintahan dipahami sebagai lemahnya kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan ADD atau bisa dikatakan ketidak mampuan pemerintah desa dalam pengelolaan dana pembangunan. lemahnya kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan ADD justru akan membuat program pembangunan yang telah dijalankan menjadi tidak efektif, efisien, responsivitas, dan berkelanjutan. Sementara kebutuhan dan tuntutan masyarakat kepada pemerintah akan pemberian pelayanan yang mensejahterakan kepada masyarakat sangat tinggi. Keseluruhan pemikiran di atas dikemas dalam judul penelitian : “pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan di desa batu limau kabupaten karimun”.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan isi tetapi tidak berdasarkan akurasi statistik. Menurut Sugiyono (2015) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengambilan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat Induktif/Kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistic, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara Induktif, lebih mementingkan proses dari pada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek peneliti.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Batu Limau Kabupaten Karimun. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

Agus Mandar (2011) melihat pengembangan kapasitas tamadun melayu dalam pembangunan budaya pemerintahan di provinsi riau. Penelitian ini dilatar belakangi dari warisan sistem sosial yang berlaku pada masa kerajaan melayu berupa kepenghuluan dan kenegarian belum dilakukan pengembangan kapasitas dengan baik sehingga berpengaruh kepada budaya pemerintahan di provinsi riau. Dalam penelitian, Agus Mandar berfokus pada tiga dimensi yang

dikemukakan oleh Grindle (1997) yakni dimensi sumber daya manusia, dimensi pengembangan organisasi dan dimensi reformasi kelembagaan.

Abdul Nadjib (2014) yang melihat pengembangan kapasitas birokrasi pemerintahan dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan. Penelitian ini dilatrbelakangi rendahnya pelayanan publik yang tidak efektif, tidak responsive dan tidak berorientasi pada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi kependudukan, perijinan, dan kesehatan air bersih. Dalam studi Abdul Nadjib menggunakan teori GTZ (2014) sebagai analisis penelitian yakni, tingkatan individu, tingkatan organisasi dan tingkatan sistem dalam melakukan pengembangan kapasitas birokrasi pemerintahan. Temuan penelitian Abdul Najib bahwa peningkatan kinerja pelayanan public juga dapat dilakukan dengan penguatan *political will* dari pemimpin, meningkatkan peran serta masyarakat, dan memperbaiki factor *endowment* yang menghambat.

MB. Zulbakhrom Tjanreng (2016) yang meneliti tentang pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan dana perimbangan di Kabupaten Maros Tahun 2010-2015. Penelitian ini dilatarbelanmgai semakin besarnya alokasi dana perimbangan yang diberikan setiap tahun, muncul tuntutan terhadap pemerintah Kabupaten Maros untuk semangkin mengembangkan kapasitas pemerintahannya dalam mengelola dana perimbangan. Adapun teori pengembangan kapasitas yang digunakan adalah teori Grindle yang melihat pengembangan kapasitas dari dimensi sumber daya manusia, dimensi penguatan organisasi dan dimensi reformasi kelembagaan. Penelitian yang dilakukan oleh Zulbakhrom Tjanreng menemukan dimensi baru dalam pengembangan kapasitas yakni dimensi regulasi.

Berdasarkan konsep dalam pengembangan kapasitas pemerintah desa yang terbagi kedalam 3 diensi yakni, dimensi sumber daya manusia, dimensi penguatan organisasi, dan dimensi reformasi kelembagaan. Maka peneliti merumuskan sebagai berikut:

Dimensi Sumber Daya Manusia

Berbagai kegiatan *capacity building* sumber daya manusia yang dilakukan belum terlaksana dengan baik, berbagai level pemerintahan belum menjadikan serius pengembangan sumber daya manusia Personel pemerintah desa sehingga menghambat terhadap efektifitas, efisiensi, responsifitas, dan keberlanjutan pengelolaan keuangan desa, juga menciptakan budaya kerja yang tidak efektif, lemahnya motivasi aparat pemerintah desa dan kurangnya komitmen yang ditandai dengan tidak adanya keseriusan dan kemauan untuk memperbaiki diri. Padahal beberapa aspek seperti motivasi kerja dan komitmen merupakan aspek yang dapat digolongkan menjadi potensi dalam pengembangan sumber daya manusia terlihat dari observasi.

Berbagai upaya *capacity building* sumber daya manusia pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan, baik itu dari pendidikan dan pelatihan, gaji, kondisi lingkungan kerja yang harmonis, pendampingan, dan rekrutmen yang mengedepankan kebutuhan dan tuntutan organisasi. Semua kegiatan pengembangan kapasitas tersebut harus dilakukan dengan benar dan konsisten agar dapat mewujudkan cita-cita pemerintah desa yang efektif, efisien, responsif dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan desa bisa diwujudkan.

Dimensi Penguatan Organisasi

Dimensi penguatan organisasi dimaksudkan menata sistem manajemen untuk meningkatkan kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas pemerintah desa dan pengaturan struktur mikro dalam pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Menurut Johnston dan Clark salah satu lingkup kegagalan dalam program pembangunan desa ialah kegagalan menciptakan organisasi yang tepat guna untuk memecahkan masalah di tingkat lokal (dalam Karsyno dan Stepanek,1985:218).

Budaya organisasi memiliki hubungan timbal balik dengan sistem pemerintahan desa. Pemerintah desa sebagai suatu organisasi dan sistem dalam konteks pembahasan ini dipengaruhi oleh budaya organisasi ketimbang mempengaruhi budaya organisasi. Perubahan kebijakan dan hukum, pendidikan dan pelatihan serta upaya-upaya yang ada dilakukan jika tidak didukung dengan budaya organisasi pemerintah desa maka peningkatan kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada tidak akan berjalan dengan baik. Sejalan dengan studi yang dilakukan Grindle dan Hilderbrand (1995:441) menemukan bahwa kinerja sektor publik yang efektif lebih cenderung didorong oleh budaya organisasi yang kuat, praktik manajemen yang baik, dan jaringan komunikasi yang efektif dari pada dengan aturan atau prosedur. Budaya organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini diarahkan kepada terlaksananya siklus kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Penguatan organisasi hadir dalam konteks ini, karena organisasi pemerintah desa semakin tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada dengan baik, maka yang terjadi selama ini untuk melakukan perubahan atau inovasi terhadap pengelolaan keuangan desa pemerintah desa sangat tergantung pada pihak luar salah satunya pemerintah supra desa. Kondisi yang tampak, ketidakmampuan pemerintah desa menata organisasi mengakibatkan pembangunan menjadi berjalan stagnan. Potensi keuangan yang memadai selama ini tidak mampu dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya kegiatan seperti pemanfaatan personel, kepemimpinan, budaya organisasi, dan komunikasi harus benar-benar diimplementasikan dalam penguatan organisasi pemerintah desa, serta penerapan secara konsisten terhadap pengaturan struktur mikro tentang pengelolaan keuangan desa dan pedoman pembangunan desa yang ada.

Dimensi Sistem atau Reformasi Kelembagaan

Dimensi sistem merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan kapasitas suatu organisasi sektor publik, bagaimanapun bagus sumber daya manusia dan organisasi membutuhkan dukungan sistem yang mendukung akan terlaksananya berbagai kegiatan pengelolaan keuangan desa, apalagi organisasi publik seperti pemerintah desa yang berada dalam konteks negara kesatuan yang terikat dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan.

Dimensi reformasi kelembagaan atau sistem lebih menitik beratkan upaya yang berasal dari luar organisasi pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya aturan main dari sistem ekonomi dan politik, penyempurnaan kebijakan, perubahan kebijakan dan reformasi konstitusi dan penguatan konstitusi. Secara umum sistem pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa telah didukung kegiatan berupa aturan main dari sistem ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan hukum, penguatan kebijakan dengan membuat peraturan pelaksana. Namun berdasarkan fakta dilapangan masih ada beberapa kegiatan untuk dilakukan berupa peraturan pelaksana dari undang-undang desa, beberapa perubahan kebijakan dan hukum baik skala nasional maupun daerah, serta isu reformasi konstitusi untuk mendukung pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

IV. Kesimpulan

Pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa memusatkan perhatian pada dimensi pengembangan sumber daya manusia, dimensi penguatan organisasi, dimensi sistem atau reformasi kelembagaan. Aspek tersebut didapat dari identifikasi dan memahami teori *capacity building* dengan disandingkan pada kondisi empiris berupa masalah dan fenomena pengelolaan keuangan desa. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan :

1. Dimensi pengembangan sumber daya manusia dalam pengadaan atau penyediaan personel yang profesional dan teknis pada prakteknya telah dilakukan beberapa kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan, gaji, kondisi lingkungan kerja, rekrutmen dan pendampingan. Namun berbagai upaya kegiatan yang ada belum menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan teknis. Hal ini karena semua level pemerintahan tidak menjadikan serius pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan belum diarahkan kepada sistem informasi desa, belum dilakukan dengan kaedah-kaedah yang benar dan konsisten, kondisi lingkungan kerja yang kondusif, dan memanfaatkan potensi dan peluang yang dimiliki.
2. Dimensi penguatan organisasi dengan focus menciptakan tata manajemen untuk meningkatkan kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada dan pengaturan struktur mikro telah dilakukan penataan system insentif dan struktur manajerial sesuai dengan ketentuan yang ada, namun belum mampu di optimalkan. Pengembangan organisasi kurang berjalan dengan baik disebabkan belum terciptanya pemanfaatan personel, kepemimpinan, budaya organisasi dan komunikasi yang menunjang terhadap kinerja organisasi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Dimensi sistem atau reformasi kelembagaan merupakan dimensi terakhir dalam rangkaian *capacity building* pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang berkaitan dengan sistem dan institusi-institusi yang ada, serta pengaruh struktur makro. Secara umum reformasi kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan telah didukung oleh rezim penguasa dalam penciptaan aturan main sistem politik dan ekonomi. Dimensi reformasi kelembagaan atau sistem lebih banyak menitik beratkan pada upaya yang dilakukan oleh struktur makro (pengaruh struktur makro) yakni lembaga yang ada di luar pemerintah desa. Beberapa kegiatan yang perlu dioptimalkan yakni melengkapi peraturan pelaksana/pendukung undang-undang desa, perubahan kebijakan dan hukum, dan penguatan terhadap konstitusi yang ada dengan memaksimalkan undang-undang desa.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Brown, Lisanne; LaFond Anne; Macintyre, Kate, 2001, *Measuring Capacity Building*, Carolina Population Centre/University of North Carolina, Chapel Hill.
- Covey, Stephen R. 2005. *The 8th Habith : Melampaui Efektivitas, Menggapai Keagungan* (Penerjemah: Wandu S. Brata & Zein Isa). Jakarta : PT Gramedia.
- Grindle, M. S., (editor), 1997, *Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*, Boston, MA : Harvard Institute for International Development.
- GTZ-SfDM. 2004. *Building Capacity to Supports Decentralisation – the Case of Indonesia 12* Tokyo Symposium on Capacity Development, Tokyo, 4-6 February 2014.
- Haryanto. 2014. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institional Capacity Development)*. Jakarta : AP2I Pres

Jurnal

- Abdul Nadjb. 2014. *Pembangunan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik (Studi di Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatra Selatan)*. Disertasi Ilmu Administrasi Konsentrasi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran.

Agus Mandar. 2011. *Pengembang Kapasitas Tamadun Melayu Dalam Pembangunan Budaya Pemerintahan Di Provinsi Riau*. Disertasi Ilmu Administrasi Konsentrasi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran.

MB. Zulbakhrum Tjanreng. 2016. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dana Perimbangan Di Kabupaten Maros Tahun 2010-2015*. Disertasi Ilmu Administrasi Konsentrasi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran.

VI. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Edy Akhyary, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberi masukan dan saran kepada penulis dalam lembar skripsi saya.
2. Bapak Imam Yudhi Prastya. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing, memberi masukan dan saran kepada penulis dalam lembar skripsi saya.

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.